



BPK Menelisik Aliran Suap Hambalang ke Senayan (1) Rp 2,5 M Mampir di Rumah Lisa

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi tahap II proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahragana Nasional, di Hambalang, Bogor, kepada KPK, Jumat (23/8) lalu. Apa temuan menarik yang diperoleh tim audit BPK, selain peran 15 anggota Komisi X DPR dalam meloloskan anggaran megaprojek itu? Berikut hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Ada seorang perempuan yang namanya sering disebut dalam hasil audit investigasi tahap II BPK. Orang tersebut Lisa Lukitawati Isa (dalam laporan BPK diberi inisial LLD), berstatus Ketua Tim Asistensi Proyek Hambalang, namun ia bukan pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahragana (Kemenpora).

Lisa banyak berperan sebagai penghubung antara pejabat di Kemenpora dengan Komisi X DPR. Anggaran pembangunanan proyek Hambalang, mencapai Rp 2,1 triliun, dibahas di Komisi X DPR sebelum diajukan ke Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan.

Sebut saja keterangan M Arifin, Komisari PT Metaphora Solusi Global (MSG), yang mengaku menyerahkan uang suap Rp 2 miliar untuk oknum anggota Komisi X DPR, melalui Lisa. PT Adhi Karya meng-

■ **Bersambung ke Hal 7**



TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
HASIL AUDIT - Ketua BPK Hadi Purnomo (tengah) serahkan hasil Audit Investigasi Tahap II Proyek Hambalang kepada Ketua KPK Abraham Samad di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (23/8).



Rp 2,5 M Mampir di Rumah Lisa

luarkan uang pelicin karena ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan kompleks olahraga di atas tanah seluas 32 hektare, di Hambalang.

PT MSG merupakan sub-kontraktor PT Yodya Karya (BUMN), konsultan proyek Hambalang. "MA (M. Arifin) menjelaskan pernah menandatangani kuitansi tertanggal 27 April 2010 atas uang sebesar Rp 2 miliar yang diterima dari PT AK (Adhi Karya) untuk keperluan anggota Dewan Komisi X, tetapi MA tidak mengetahui siapa anggota Dewan dimaksud," begitu tertulis dalam laporan BPK yang ditandatangani J Widodo H Mumpuni, Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK.

Arifin mengaku menyerahkan uang kepada Lisa di kantor Pondok Pinang, kawasan yang menyuruh pemberian uang? Arifin mengaku mendapat informasi dari Wafid Muharam, saat itu menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), dan Lisa.

"Dalam rangka penambahan anggaran proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)

Hambalang sebesar Rp 150 miliar di APBN Perubahan tahun anggaran 2010, dibutuhkan dana untuk anggota Komisi X," begitu pesan yang diterima Arifin dari Wafid dan Lisa.

Sehari setelah pemberian suap Rp 2 miliar, Arifin kembali menyerahkan Rp 1,3 miliar untuk anggota Komisi X. Kali ini uang yang dikemas dalam tas tengah warna hitam itu diserahkan kepada oknum pegawai Kemenpora di lobi belakang kantor instansi pemerintah tersebut.

Simpan di kamar

Cerita Arifin mengenai suap Rp 3,3 miliar tersebut tak diakui Lisa maupun oknum pegawai Kemenpora berinisial PN yang menerima uang suap. "Sedang WM (Wafid Muharam) menyatakan tidak mengetahui adanya uang yang diambil MA (Arifin) dari PT Adhi Karya tersebut. Selanjutnya WM menyatakan hal itu mungkin merupakan kesepakatan antara MA dan PT Adhi Karya untuk meyakinkan anggaran disetujui DPR," ujar Wafid kepada pemeriksa dari BPK.

Uang suap terus mengalir. Pada akhir 2010, Arifin kembali menyerahkan uang Rp 2,5 mi-

Sambungan Hal. 3

takan ya terima kasih," ujar Arifin kepada BPK. Namun pengakuan Arifin dibantah Wafid dan stafnya yang menerima uang itu.

Bukan hanya itu, PT Adhi Karya juga pernah diminta uang Rp 600 juta untuk memenangkan Menpora Andi Alfian Mal-larangeng dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat di arena kongres Bandung. "Pada April 2010, Wafid Muhammad mengaku pernah dimintai MNS (Ketua Komisi X DPR, Mahyudin NS) uang Rp 500 juta untuk pemenangan Menpora di Kongres Partai Demokrat di Bandung," tulis BPK.

Wafid menyetujui usulan stafnya untuk minta uang kepada PT Adhi Karya melalui Direktur Operasional Teuku Bagus M Noor. Ketika uang Rp 500 juta sudah didapat, ternyata Mahyudin minta tambahan Rp 100 juta.

Uang Rp 600 juta diserahkan adik Wafid kepada ajudan Mahyudin di Rumah Makan Sederhana, Geger Kalong, Bandung. Namun ketika diperiksa petugas BPK ajudan Mahyudin berinisial Rza mengaku lupa terkait penyerahan uang Rp 600 juta dari adik Wafid Muharam. (feb)

liar kepada Lisa untuk anggota Komisi X DPR. Kali ini uang dikemas dalam tas ransel warna hitam dan diserahkan Arifin kepada Lisa di rumahnya, kawasan elite Pondok Indah, Jakarta.

Setelah menerima uang itu Lisa menghubungi Agus S, Sekretaris Komisi X DPR, untuk datang ke rumahnya. "Kemudian Agus mengambil uang dalam tas ransel warna hitam tersebut yang waktu itu disimpan di kamar depan rumah LLI (Lisa Lukitawati Lisa)," tulis pemeriksa dari BPK dalam laporannya.

Aliran uang berikutnya terjadi pada awal 2011. Saat itu Arifin mengambil uang dolar AS senilai Rp 4 miliar dari kas PT Adhi Karya, yang kemudian diserahkan kepada staf Wafid Muharam di lantai 3 gedung Kemenpora di Senayan.

Uang tersebut permintaan Lisa yang menjelaskan Wafid Muharam membutuhkan uang suap untuk Komisi X DPR terkait pengajuan tambahan anggaran optimalisasi Rp 920 miliar di APBN tahun anggaran 2011.

"Setelah menyerahkan uang Rp 4 miliar, Arifin menelpon Wafid Muharam. Kemudian Wafid Muharam menga-